

PERENCANAAN KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)

Nova Yohana¹

¹Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau
Kampus Bina Widya Jl. Hr. Soebrantas KM. 12.5 Simp. Baru Pekanbaru-28293
Email: nova.yo7@gmail.com

Diterima : 31 Januari 2018

Disetujui : 15 Februari 2018

Diterbitkan : 28 Februari 2018

Abstrak

Program pengembangan pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak merupakan sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dilaksanakan berdasarkan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan komunikasi pemerintah daerah dalam implementasi program Kabupaten Layak Anak melalui pengarusutamaan hak-hak anak dalam pembangunan daerah di Kabupaten Siak. Metode Penelitian menggunakan metode kualitatif. Informan penelitian dipilih secara purposif dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perumusan dalam rangka perencanaan komunikasi kebijakan KLA telah melalui tahap-tahap formulasi sebuah kebijakan. Tujuan program pengembangan KLA diimplementasikan ke dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Siak dengan penyusunan rencana aksi daerah. Khalayak sasaran dari implementasi pengembangan KLA adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Siak baik secara perseorangan maupun kelompok. Pesan yang dirancang berkaitan dengan peran kelompok khalayak sasaran terkait pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Kabupaten Siak. Dalam upaya menginformasikan kebijakan program KLA, pemilihan media mempertimbangkan karakteristik dan tujuan dari isi pesan yang ingin disampaikan, serta jenis media yang dimiliki oleh khalayak.. Evaluasi program menekankan agar perangkat daerah mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam menunjang dan mendukung program KLA dan merencanakan sesuai dengan kebutuhan dari KLA di Kabupaten Siak.

Kata Kunci: Perencanaan Komunikasi, Pemerintah Daerah, Kabupaten Layak Anak

Abstract

The development program of Child-Friendly City (KLA) in Siak Regency is a development system based on children rights through a comprehensive and sustainable integration of government, society and business world thoroughly and continuously. Implemented based on instruction from Ministry of Women and Child Empowerment (P3A), through Ministerial Regulation (Permen) Number 11 Year 2011 on the Development Policy of Child-Friendly City. The purpose of this research is to find the communication planning of local government in the implementation of the program for Child-Friendly City through prioritizing children

rights in regional development, Siak regency. The method that being used for this research is qualitative method. The research informants were chosen purposively and the data were collected through observation, interview, and documentation. The results of the research shows that the process of arrangement in order of Child-Friendly City policy communication planning has gone through the stages of a policy formulation. The purpose of the Child-Friendly City development program is being implemented into the vision and mission of Siak Regency development with the preparation of regional action plans. The audience that being targeted for the implementation of Child-Friendly City development is the whole society in Siak Regency either individually or in groups. Messages are designed in relation to the role of target audience related to the fulfillment of children's rights in Siak Regency development. In an effort to inform Child-Friendly City program policies, media selection takes into consideration the characteristics and objectives of the message content submitted, and the type of media owned by audiences. Program evaluation emphasizes in order for the regional apparatus to evaluate what its authority and duties are in support the Child-Friendly City program and plan according to the needs of Child-Friendly City in Siak Regency.

Keywords: *Communication Planning, Local Government, Child-Friendly City*

PENDAHULUAN

Kebijakan Pengembangan kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) merupakan keikutsertaan Indonesia dalam komitmen dunia menciptakan dunia layak anak dan merupakan komitmen global. Kebijakan Kota Layak Anak merupakan kebijakan dari pusat dibawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kemudian dalam pengembangannya diserahkan kepada masing-masing daerah dalam pemenuhan hak anak dikabupaten/kota. Kabupaten/Kota Layak Anak dideskripsikan sebagai sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (*holistik*) dan berkelanjutan (*sustainable*) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA).

Pembangunan Kabupaten/Kota Layak Anak diawali dengan penelitian mengenai "Children's Perception of the Environment" oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial; masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. (Gemari, 2010; 41).

Kabupaten Siak Sri Indrapura merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau yang berkomitmen mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Komitmen Pemerintah Kabupaten Siak mewujudkan Kabupaten Layak Anak ditandai dengan terpilihnya Kabupaten Siak menjadi daerah percontohan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah Propinsi Riau. Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang sudah dua kali meraih penghargaan sebagai kota layak anak dengan kategori pratama. Pertama kali pada tahun 2013, Negeri Istana ini mendapatkan penghargaan Kabupaten Layak Anak, yang diserahkan oleh Kementerian P3A Linda Gumelar, di era Presiden SBY. Kedua kali, pada tahun 2015 Kabupaten Siak meraih penghargaan serupa dengan kategori pratama oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kategori pratama merupakan kategori kota layak anak tingkat pertama dari tiga kategori yang ada di Indonesia saat ini yaitu Pratama, Madya, Nindya, Utama. Penghargaan

ini merupakan apresiasi pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Indonesia kepada kabupaten/kota yang memberikan perhatian cukup besar terhadap anak.

Berdasarkan PERMEN P3A No. 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak sebuah Kabupaten/Kota Layak Anak idealnya harus memenuhi indikator yang telah ditetapkan oleh KHA, dikelompokkan kedalam 6 bagian, yang meliputi bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak, yaitu : klaster hak sipil dan kebebasan ; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatifnya ; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan ; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya ; serta klaster perlindungan khusus. Disampaikan Bupati Siak bahwa ada empat hak anak yang harus diperhatikan, yaitu hak anak tidak boleh diperkerjakan, hak mendapatkan pendidikan dan rekreasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Salah satu program pemerintah melaksanakan pendidikan gratis adalah untuk mengatasi masalah anak yang ada di Kabupaten Siak agar dapat menikmati pendidikan, karena pendidikan adalah milik semua masyarakat Indonesia. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tempat-tempat yang dijadikan sebagai tempat bermain bagi anak-anak. (<http://infopublik.id/read/58954/pemkab-siak-programkan-kota-layak-anak.html>).

Proses komunikasi program Kabupaten/Kota Layak Anak dilakukan secara terpadu dan sinergi disetiap sektor, baik pemerintah, masyarakat dan dunia usaha untuk bersama-sama terlibat dalam mewujudkan Kabupaten Siak sebagai Kabupaten Layak Anak. Bentuk kepedulian melalui program Kota Layak Anak dimaksudkan sebagai proses komunikasi orang-orang terhadap lingkungannya Dalam rangka penerapan Kota Layak Anak di Kabupaten Siak Sri Indrapura melibatkan instansi-instansi pemerintahan, seperti: Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) siak, Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (BP3AKB), Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Dinas Sosial, Polresta, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Masyarakat dan instansi lainnya. Komunikasi adalah suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungannya dengan : (1) membangun hubungan antar sesama manusia; (2) pertukaran informasi; (3) menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain; (4) berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu (Cangara, 2005: 14). Untuk mewujudkan kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak dilakukan melalui penguatan komitmen politik yang ditunjukkan dengan membentuk Gugus Tugas Kota Layak Anak yang disahkan dengan SK Bupati Siak.

Peranan komunikasi pembangunan telah banyak dibicarakan oleh para ahli, pada umumnya mereka sepakat bahwa komunikasi mempunyai andil penting dalam pembangunan Perubahan yang dikehendaki dalam pembangunan tentunya perubahan kearah yang lebih baik atau lebih maju keadaan sebelumnya. Diperlukan perencanaan komunikasi pemerintah daerah dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak anak agar penyebaran pesan dapat berlangsung secara efektif dan tepat sasaran kepada seluruh masyarakat di Wilayah kabupaten Siak.

Perencanaan komunikasi adalah proses pengalokasian sumber daya komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi. Sumber daya tersebut tidak saja mencakup media massa dan komunikasi antar pribadi, tapi juga setiap aktivitas yang dirancang untuk mengubah perilaku dan menciptakan keterampilan-keterampilan tertentu di antara individu dan kelompok dalam lingkup tugas-tugas yang dibebankan oleh organisasi (Middleton, 1978 dalam Cangara, 2014: 47). Sejalan dengan pendapat Middleton di atas, Hancock (1978: 11) mengemukakan bahwa perencanaan komunikasi berpusat pada pemanfaatan komunikasi sebagai suatu upaya mobilisasi yang terintegrasi di dalam suatu.

Middleton (dalam Cangara, 2014: 83-84) menjelaskan bahwa terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam perencanaan komunikasi. Model yang dibuat oleh Middleton diawali dengan riset untuk memperoleh data dan upaya untuk mengetahui kebutuhan khalayak (*need assessment*). Adapun langkah-langkah perencanaan komunikasi menurut Middleton adalah: 1) Pengumpulan data *baseline* dan *need assessment* 2) Perumusan tujuan 3) Analisis dan segmentasi khalayak 4) Analisis perencanaan dan pengembangan strategi 5) Pemilihan media 6) Desain dan pengembangan pesan 7) Perencanaan manajemen 8) Implementasi atau pelaksanaan program komunikasi 9) Evaluasi program komunitas.

Untuk mewujudkan KLA tersebut, maka pemerintah kabupaten/ kota perlu melakukan berbagai upaya pengintegrasian sumber daya, isu-isu perlindungan dan peningkatan kualitas anak ke dalam dokumen perencanaan dan implementasi pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Rencana Aksi Daerah KLA yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA. Sejalan dengan hal tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis upaya-upaya perencanaan komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Siak dalam program pengembangan kebijakan pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Moleong (2007:6) menjelaskan, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh) dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang salah satunya bermanfaat untuk keperluan meneliti dari segi prosesnya.

Informan pada penelitian ini adalah Informan terdiri dari: Kepala Bappeda (Ketua gugus Tugas KLA), Kepala Badan BP3AKB (Sekretaris gugus tugas KLA), Staf Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Forum Anak, lembaga bisnis yang terlibat dalam kemitraan; organisasi masyarakat sipil seperti LSM, orang tua dan anak-anak yang menjadi kelompok sasaran program Kota Layak Anak. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data selama di lapangan menggunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman melalui tiga kegiatan yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kualitas atau keabsahan data menggunakan teknik triangulasi

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) di Kabupaten Siak mulai diimplementasikan pada tahun 2012. Perencanaan KLA di Kabupaten Siak dilaksanakan berdasarkan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Permen tersebut, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Pemerintah Kab. Siak pada tahun 2011 sudah mulai merencanakan program-program layak anak serta berbagai perangkat yang mendukung kebijakan KLA baik sumber daya manusia, sarana maupun prasarana. Barulah pada tahun 2012 pemerintah Kab. Siak

membentuk Gugus Tugas, Tim Perumus dan Narasumber Kegiatan Koordinasi perencanaan Pembangunan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak berdasarkan Surat keputusan Bupati Siak Nomor: 380.D/HK/KPTS/2012.

Perencanaan mencakup penetapan tujuan dan standar, penentuan dan prosedur, pembuatan rencana serta prediksi yang akan terjadi. Melalui perencanaan, pemimpin akan mengidentifikasi hasil kerja yang diinginkan serta mengidentifikasi cara-cara mencapainya (Suprpto, 2011: 131). Perencanaan komunikasi pada dasarnya melibatkan aspek-aspek atau unsur-unsur yang membentuk kesatuan komunikasi, yaitu komunikator, pesan, komunikan, media dan efek. Menurut Dilla (2007:181) menyatakan untuk melakukan sesuatu kegiatan yang diharapkan akan dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan hendaklah menggunakan rencana. Dalam bidang komunikasi dikenal perencanaan komunikasi. Dalam manajemen komunikasi, pada aspek perencanaan, sumber daya menyusun perencanaan untuk komunikator, pesan, media, khalayak (komunikan) dan rencana pengaruhnya atau efek (Suprpto, 2011: 140). Perencanaan yang baik selalu memerlukan beberapa tahapan dalam penerapannya sehingga dapat mencapai sasaran yang dituju.

Perencanaan KLA di Kabupaten Siak dilaksanakan berdasarkan instruksi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P3A) melalui Peraturan Menteri (Permen) Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Berdasarkan Permen tersebut, KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Artinya KLA hanya dapat diimplementasikan dengan adanya integrasi komitmen antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Bappeda Kabupaten Siak berikut ini:

“Sebelum menerima peraturan itu, kita ukur diri kita dulu, kita sandingkan dengan permen, disosialisasikan kepada seluruh elemen kemudian muncul komitmen. Pak bupati komit untuk melakukan KLA ini walaupun penuh dengan tantangan dan didalam permen tidak ada peraturan kalau tidak mengikuti KLA ada sanksi. Jelas ya kalau ini keinginan pusat. Tapi daerah komit untuk itu. Semua perangkat daerah, NGO maupun government terlibat.”

Dari pernyataan Sekretaris Bappeda diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan KLA adalah keinginan pusat yang diatur dalam Permen P3A. Menguatkan hal tersebut Sekretaris BP3AKB mengatakan bahwa Perencanaan KLA di Kabupaten Siak didasarkan pada Permen Nomor 12 Tahun 2011 dimana untuk membentuk KLA, pemerintah harus memiliki gugus tugas KLA, membentuk forum anak dan juga bekerjasama dengan perusahaan setempat untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Kebijakan KLA yang diterapkan di Kabupaten Siak adalah imbas dari adanya komitmen yang besar dari Bupati Siak. Hal ini didasarkan pada hasil penelitian di lapangan yang menunjukkan bahwa hampir semua informan yang diwawancarai mengatakan bahwa bupati memiliki komitmen yang sangat kuat untuk implementasi KLA di Kabupaten Siak.

Langkah awal dalam perencanaan komunikasi diperlukan seperangkat data dasar (*baseline data*) yang akurat dan memadai termasuk informasi tentang identifikasi masalah dan kajian mengenai apa yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah yang dihadapi (Middleton dalam Cangara, 2014: 83). Pelaksanaan kebijakan pembangunan KLA di Kabupaten Siak diawali dengan pengumpulan data dan menganalisis data mengenai situasi permasalahan anak di setiap tingkat kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Siak sebagai sebuah dasar untuk merumuskan dan untuk merencanakan program. Data basis

KLA merupakan hal yang amat sangat penting sebagai proses dari pemecahan masalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan sampai nanti dievaluasi. Data basis tersebut diperoleh dari laporan capaian kerja setiap SKPD terkait pemenuhan hak-hak anak, termasuk oleh kecamatan dan juga dengan menyertakan Forum Anak dalam pengumpulan data dasar anak terkait kelompok-kelompok anak di setiap kecamatan yang tergabung dalam Forum Anak Kabupaten Siak. Melalui data basis itulah dapat terlihat masalah anak apa saja yang perlu dipecahkan untuk kemudian dilakukan inventarisasi kebutuhan-kebutuhan anak.

Perumusan Tujuan Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Tujuan dapat didefinisikan sebagai kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Maksud utama penentuan tujuan adalah untuk membimbing program ke arah pemecahan masalah. Tujuan dapat menjadi target yang menjadi dasar bagi pencapaian keberhasilan program. Pada dasarnya tujuan program menjelaskan hasil-hasil apa saja yang harus dicapai pada setiap khalayak sasaran. Dalam menetapkan tujuan program, seorang perencana komunikasi harus bisa menjawab pertanyaan: mengapa anda perlu melakukan kegiatan/program dan apa yang ingin anda capai dengan kegiatan tersebut, perubahan bagaimana yang anda inginkan, apakah tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan kebutuhan target sasaran (Cangara, 2014: 105).

Keseriusan dan komitmen Bupati Siak bersama-sama dengan semua elemen Pemerintah Daerah dalam merumuskan tujuan program pengembangan Kabupaten layak anak di kabupaten Siak diimplementasikan kedalam visi dan misi jangka menengah Tahun 2011-2016 sesuai dengan periode masa jabatan Bupati Siak. Bupati sebagai komunikator utama di tingkat daerah khususnya di Kabupaten Siak menjadikan kebijakan pengembangan KLA menjadi prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada periode pemerintahannya. Oleh karena itu tujuan program pengembangan Kabupaten Layak anak (KLA) pada tahap ini ditetapkan dalam Visi Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 yang berbunyi "*Terwujudnya masyarakat Kabupaten Siak yang sehat, cerdas, dan sejahtera dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan berbudaya melayu serta sebagai kabupaten dengan pelayanan publik terbaik di Provinsi Riau tahun 2016.*"

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat dari informan penelitian lebih khususnya tujuan program pengembangan kabupaten layak anak di Kabupaten Siak meliputi mengembangkan kebijakan tentang lingkungan yang layak anak; memobilisasi sumber daya dan semua mitra kerja potensial di Kabupaten Siak ; menyusun strategi, program, kegiatan, dan anggaran untuk mengembangkan kemampuan kabupaten Siak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak; memperkuat peran pemerintah Kabupaten Siak dalam menyatukan tujuan pengembangan daerah dalam bidang perlindungan anak; menyusun baseline data tentang situasi anak di wilayah kabuapten Siak sebagai dasar untuk merumuskan dan merencanakan program yang terbaik untuk anak; memperkuat kemampuan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak yang ada di wilayah Kabupaten Siak.

Analisis dan Segmentasi Khalayak Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Analisa khalayak, merupakan tahap awal yang sangat menentukan arah dan tujuan perencanaan. Pemahaman komprehensif mengenai tatanan masyarakat ini diperlukan untuk menentukan khalayak sasaran dan format kegiatan yang sesuai dengan keinginan komunikator dan kebutuhan khalayak sasaran. Dilla (2007:181). Dalam proses komunikasi, baik komunikator maupun khalayak mempunyai kepentingan yang sama. Tanpa persamaan kepentingan, komunikasi tak mungkin berlangsung, karena itu untuk berlangsungnya

komunikasi dan kemudian mencapai hasil yang positif maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan, metoda dan media.

Dalam perencanaan komunikasi pemerintah Kabupaten Siak yang menjadi khalayak sasaran dari implementasi pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok. Peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan media massa dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus hak anak di Kabupaten Siak. Artinya KLA hanya dapat diimplementasikan dengan adanya integrasi komitmen antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Rancangan Pesan Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Dalam perencanaan Komunikasi, pesan memiliki peran penting untuk tercapainya suatu tujuan, dimana isi pesan yang dapat mengkondisikan, menguatkan, atau membuat perubahan tanggapan sasaran. Pesan disini adalah informasi yang disampaikan oleh sumber kepada penerima. Bupati Siak sebagai komunikator pada tahap ini memiliki peran yang sangat penting dalam mengkomunikasikan inti pesan dari KLA kepada seluruh elemen pemerintahan dan masyarakat Kabupaten Siak.

Visi Siak 2011-2016 yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak menjadi pesan kunci dalam tujuan program pengembangan Kabupaten Layak anak. Dari visi ini ada lima kata kunci yang disampaikan oleh Bupati Siak seiring dengan kebijakan pengembangan KLA yang dimanahkan oleh Menteri P3A yaitu sehat, cerdas, sejahtera, agamis dan berbudaya melayu, serta pelayanan publik terbaik yang dikategorikan kedalam lima kluster hak anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) perlindungan khusus, (3) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya. Kelima kluster hak anak ini adalah tujuan program pengembangan kabupaten Layak anak di Kabupaten Siak dengan pengarusutamaan hak-hak anak dalam pembangunan daerah.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa komunikasi yang dijalin oleh Bupati Siak kepada bawahannya dalam menyampaikan kebijakan pengembangan KLA berisi pesan informatif, pesan persuasif, dan pesan edukatif, baik lisan maupun tertulis. Adapun pesan yang disampaikan terhadap khalayak sasaran dalam pengembangan kabupaten Layak anak di Kabupaten Siak adalah mencakup beberapa hal diantaranya penjelasan yang menyeluruh tentang tujuan kebijakan, keuntungan yang akan diterima dari kebijakan kepada kelompok sasaran, instansi pemerintah yang terkait, dan bagaimana mekanisme pelaksanaan kebijakan di lapangan, mengenai lima kluster yang harus dipenuhi agar KLA dapat terwujud, adalah hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus bagi anak.

Intinya pesan yang dirancang berkaitan dengan peran kelompok khalayak sasaran terkait pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Kabupaten Siak. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak, dilakukan dengan cara memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak; memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak; melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran hak Anak; berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak; melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak; menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh

kembang Anak; berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban ; dan memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.

Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan, dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak. Peran media massa, dilakukan dengan carapenyebaran informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak. Peran dunia usaha, dilakukan dengan cara: kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak; produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.

Perencanaan dan Pemilihan Media Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Pemilihan media memerlukan kecermatan, dengan mempertimbangkan kelemahan dan keunggulan sifat masing-masing media. Cangara (2014: 148) menjelaskan bahwa media luar ruang (*outdoor media*) biasa dikaitkan dengan dunia estetika dan ditempatkan pada tempat-tempat yang ramai dilihat oleh banyak orang. Media ini memiliki kelebihan dalam bidang daya tarik dan sifatnya yang tahan lama. Sementara media internet memiliki kelebihan, yaitu kemampuan untuk menembuh batas wilayah, ruang dan waktu (Cangara, 2014: 152). Setidaknya diperlukan media yang dapat di akses oleh masyarakat sasaran. Memilih saluran dan media komunikasi haruslah mempertimbangkan karakteristik dan tujuan dari isi pesan yang ingin disampaikan, serta jenis media yang dimiliki oleh khalayak.

Secara umum ada dua media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak dalam upaya menginformasikan kebijakan program Kabupaten Layak Anak, yaitu media cetak dan media elektronik. BP3AKB menggunakan media cetak (koran, brosur, Spanduk, Leaflet) dan media elektronik (radio, televisi, internet). BP3AKB Kabupaten Siak memiliki *website* resmi, yaitu www.bp3akb@siakkab.go.id/ serta media *facebook* di BP3AKB Kabupaten Siak. Selain itu juga media lokal, yaitu radio RPK Siak. Sedangkan untuk televisi ada Siak Televisi.

Radio dan televisi merupakan media yang paling efektif menjangkau sasaran luas, selain karena jangkauan frekuensinya yang menyebar luas hingga wilayah pedalaman, radio dan televisi banyak diminati oleh masyarakat Kabupaten Siak. Media lokal dipilih karena pesan yang disampaikan dapat menjangkau khalayak lokal dan kecepatannya pesannya tidak terbatas. Media ini digunakan dari awal berdiri dan setiap ada program kegiatan yang dilaksanakan oleh BP3AKB Kabupaten Siak. Media online dan media sosial digunakan karena pesan yang disampaikan dapat menjangkau khalayak secara nasional.

Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Layak Anak

Evaluasi adalah proses untuk menelaah kebijakan, program, ataupun kegiatan yang berjalan berdasarkan konteks, relevansi, dampak dan *outcomes*, keberlanjutan, efektivitas dan efisiensi berdasarkan data dan informasi yang kredibel (Primahendra, 2015). Cangara (2014: 174) mengemukakan bahwa evaluasi merupakan metode pengkajian dan penilaian keberhasilan kegiatan komunikasi yang telah dilakukan, dengan tujuan memperbaiki atau meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai sebelumnya. Evaluasi dilakukan dalam rangka mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program komunikasi. Melalui evaluasi, program-program yang sudah dilakukan dapat dinilai efektivitasnya sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membuat rancangan perencanaan untuk program yang akan datang.

Evaluasi program KLA di Kabupaten Siak secara umum dipimpin oleh Bupati Siak dan dilakukan ketika kegiatan Musrenbang tahunan berlangsung. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap evaluasi komunikasi implementasi KLA di Siak, yang berperan sebagai komunikator adalah Bupati Siak walaupun secara nasional evaluasi akan dilakukan oleh Menteri P3A yang kemudian dilaporkan kepada Presiden sehingga menghasilkan *output* berupa pemberian penghargaan KLA yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu pratama, nindya, dan utama. Rapat koordinasi dan evaluasi ini juga menekankan agar Perangkat Daerah mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam menunjang dan mendukung program KLA di Kabupaten Siak dan merencanakan sesuai dengan kebutuhan dari KLA. Selain itu diharapkan kepada Perangkat Daerah menindaklanjuti indikator evaluasi KLA yang masih rendah untuk dilakukan perbaikan. Kedepannya hasil evaluasi KLA ini dapat dijadikan perencanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Siak Layak Anak guna menuju Provinsi Riau sebagai Provinsi Layak Anak.

PENUTUP

Hasil penelitian dan pembahasan diatas menghasilkan kesimpulan mengenai Perencanaan Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dalam Implementasi Kebijakan Pembangunan Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai berikut: 1) Pelaksanaan kebijakan pembangunan KLA di Kabupaten Siak diawali dengan pengumpulan data dan menganalisis data mengenai situasi permasalahan anak di setiap tingkat kecamatan dan desa yang ada di wilayah Kabupaten Siak sebagai sebuah dasar untuk merumuskan dan untuk merencanakan program; 2) Data basis KLA merupakan hal yang amat sangat penting sebagai proses dari pemecahan masalah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan sampai nanti dievaluasi; 3) Keseriusan dan komitmen Bupati Siak bersama-sama dengan semua elemen Pemerintah Daerah dalam merumuskan tujuan program pengembangan Kabupaten layak anak di Kabupaten Siak diimplementasikan kedalam visi dan misi jangka menengah Tahun 2011-2016 sesuai dengan periode masa jabatan Bupati Siak; 4) Dalam perencanaan komunikasi pemerintah Kabupaten Siak yang menjadi khalayak sasaran dari implementasi pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Siak adalah seluruh lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Siak. Masyarakat berperan serta dalam perlindungan anak, baik secara perseorangan maupun kelompok; 5) Visi Siak 2011-2016 yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak menjadi pesan kunci dalam tujuan program pengembangan Kabupaten Layak anak. Intinya pesan yang dirancang berkaitan dengan peran kelompok khalayak sasaran terkait pemenuhan hak anak dalam pembangunan di Kabupaten Siak yang bersifat pesan informatif, pesan persuasif, dan pesan edukatif; 6) Secara umum ada dua media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah daerah melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak dalam upaya menginformasikan kebijakan program Kabupaten Layak Anak, yaitu media cetak dan media elektronik; 7) Evaluasi program KLA di Kabupaten Siak secara umum dipimpin oleh Bupati Siak dan dilakukan ketika kegiatan Musrenbang tahunan berlangsung. Evaluasi ini menekankan agar Perangkat Daerah mengevaluasi apa saja yang menjadi kewenangan dan tugasnya dalam menunjang dan mendukung program KLA di Kabupaten Siak dan merencanakan sesuai dengan kebutuhan dari KLA.

REFERENSI

- Cangara, Hafid, 2005. *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo
Gemari, 2010 . *Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi*.
Jakarta, Cahaya Priangan Utama

- Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung :Penerbit PT Remaja Rosdakarya*
- Dilla Sumadi. 2007. Komunikasi Pembangunan Pendekatan Terpadu. Bandung: Simbiosis Rekatama Media*
- Suprpto, Tommy, 2009, Pengantar Ilmu Komunikasi (dan peran manajemen dalam komunikasi). Yogyakarta: CAPS*

Sumber Lain

- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Pelaksanaan Kabuapten/Kota Layak Anak
- Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kabupaten Siak